

PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI PERSPEKTIF POLITIK EKONOMI ISLAM

Juliana¹, Ropi Marlina², Ramdhani Saadillah³, Siti Maryam⁴

^{1,3,4}Prodi Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Pendidikan Jl. Setiabudi No 229 Indonesia

²STIE Dr. KHEZ Mutaqien Jl. KK Singawinata No.83, Purwakarta

julian@upi.edu, ropimarlina@gmail.com

Abstraks

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketimpangan pemerataan pendapatan yang berujung pada kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Tujuan dari artikel ini untuk memberikan gambaran mengenai penerapan stategi politik ekonomi Islam berkaitan dengan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan literatur review yang di ambil dari beberapa referensi terkait, berupa jurnal maupun kitab-kitab klasik. Hasil dari kajian ini yaitu menjelaskan Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Islam tidak melihat pertumbuhan kekayaan sebagai sesuatu yang terpisah dengan cara distribusinya (pemerataan) dan tuntutan realisasi keadilan. Pertumbuhan ekonomi yang ideal akan mampu terwujud dengan optimal dan memiliki dampak terhadap pemerataan ekonomi jika menggunakan politik ekonomi Islam. Melalui Strategi langsung dan tidak langsung mampu mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Keyword: *Pemerataan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Politik Ekonomi Islam*

Abstracts

This research is based on the unevenness of income distribution that leads to the society's low welfare. The purpose of this article is to provide an overview of the implementation of Islamic economic politics with regard to Welfare and Equity Income. The method used is qualitative with literature review approach taken from several related references, in the form of journals and classical books. The result of this study is to explain economic growth according to the Islamic economy, not just related to the increase of goods and services, but also related to the aspect of morality and moral quality as well as the balance between worldly and ukhrawi goals. Islam does not see the growth of wealth as something separate by means of its distribution (equity) and the demand for the realization of justice. Ideal economic growth will be able to materialize optimally and have an impact on economic equity if using Islamic economic politics. Through direct and indirect strategies able to realize the equity of economy and prosperity for the community.

Keyword: *Economic Equality, Economic Growth, Politics of Islamic Economics*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi dewasa ini banyak ketergantungan kepada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri merupakan proses kenaikan produksi perekonomian suatu negara yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional (Huda,2015). (Rahardja,2018) menjelaskan salah satu indikator terjadinya alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional yang dihasilkan sebuah perekonomian pada suatu periode tertentu. Jadi Salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah naik turunnya besaran pendapatan nasional atau *Gross Domestic Product*.

Indonesia dalam mengukur pertumbuhan ekonomi menggunakan teori ini, dengan Produk Domestik Bruto (GDP)

atas harga konstan (2010) mencapai Rp 2377532,80 Milyar di tahun 2017 triwulan satu, jumlahnya sedikit meningkat dibandingkan dengan 2016 triwulan satu sebesar Rp. 2264089,70 Milyar dan Rp. 2157848 Milyar di tahun 2015 (BPS, 2017 Mei). Melihat GDP Indonesia dari tahun 2015, 2016 dan 2017, menggambarkan bahwa Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik.

Selain itu bukti lain pertumbuhan ekonomi membaik adalah jumlah kemiskinan di Indonesia yang menurun, dari tabel 1 kemiskinan di Indonesia dari tahun ketahun jumlahnya fluktuatif, cenderung menurun namun perubahannya lambat. Jumlah kemiskinan pada tahun 2016 di semester dua sebesar 27764,32 juta jiwa sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2015 di semseter dua yaitu sebesar 28513,57 juta jiwa.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (Ribuan Jiwa)

Jumlah Penduduk Miskin Indonesia (Ribuan Jiwa)			
tahun	semester	perkotaan/pedesaan	jumlah
2013	2	kota	10634.47
		desa	17919.46
		jumlah	28553.93
2014	1	kota	10507.20
		desa	286097
		jumlah	28280.03
	2	kota	10356.69
		desa	296681
		jumlah	27727.78
2015	1	kota	10652.64
		desa	17940.15
		jumlah	28592.79
	2	kota	10619.86
		desa	17893.71
		jumlah	28513.57
2016	1	kota	10339.79
		desa	17665.62
		jumlah	28005.41
	2	kota	10485.64
		desa	17278.68
		jumlah	27764.32

sumber:BPS (2016)

Namun demikian dalam waktu yang bersamaan kesenjangan penduduk miskin dan penduduk kaya di Indonesia tidak berubah, koefisien gini/rasio gini dalam lima

tahun sejak 2010 sampai hingga 2015 tercatat 0,38; 0,41; 0,41; 0,42; 0,42; dan 0,42 (Baderi, 2016).

Bagan 1 Rasio Gini di Indonesia tahun 2010-2015



Dari data tersebut terlihat bahwa ketimpangan ekonomi Indonesia cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan begitu, tidak sulit menggambarkan dengan jelas siapa yang sesungguhnya menikmati pertumbuhan ekonomi karena justru rata-rata gini rasio menunjukkan angka peningkatan.

Ini berarti pencapaian pendapatan domestik bruto (PDB) yang tinggi selama ini, ternyata masih tak mampu mewujudkan berbagai fenomena penting bagi kualitas hidup rakyat. Tak heran jika saat sebagian kalangan bangga dengan prestasi pertumbuhan PDB yang kita capai, mayoritas rakyat justru kurang merasakan ada perbaikan taraf kehidupannya.

Di satu sisi, pencapaian pertumbuhan mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbesar jumlah kelas menengah. Namun, di sisi lain juga mempelebar ketimpangan ekonomi. Menurut Bank Dunia, manfaat dari pertumbuhan ekonomi lebih dinikmati oleh 20% masyarakat

terkaya. Sementara sekitar 80% penduduk, lebih dari 205 juta orang terlihat merasa masih tertinggal (WorldBank, 2015).

Kemudian hasil survei lain yang dipaparkan oleh Oxfam International pada Januari 2017, hasil riset tersebut menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat keenam dalam kategori ketimpangan distribusi kekayaan terburuk di dunia. Selain itu Oxfam dalam laporannya menyatakan bahwa delapan orang terkaya memiliki kekayaan penduduk bumi, selama 15 tahun menunjukkan konsentrasi kekayaan di Indonesia dengan kelompok ultrakaya semakin bertambah kekayaannya (Oxfam, 2017).

Berdasarkan uraian di atas penting kirannya untuk menemukan sebuah solusi untuk mengatasi permasalahan terkait kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Sebab pemerataan ekonomi merupakan hal yang sangat penting guna mewujudkan kesejahteraan. Namun dengan pola ekonomi saat ini yang menggunakan pola

konvensional akan sulit mewujudkan pemerataan ekonomi. Maka dari itu penting untuk menjawab pertanyaan ini:

Apa dan bagaimana pandangan Islam tentang pertumbuhan ekonomi? Serta bagaimana Strategi mewujudkan pemerataan ekonomi dalam Islam?

Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan diatas menarik minat penulis untuk melakukan kajian lebih dalam tentang pertumbuhan ekonomi dalam Islam dan mencari solusi yang tepat untuk mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, serta bagaimana merumuskannya dalam bentuk strategi dan kebijakan yang tepat dalam kegiatan perekonomian pada umumnya.

Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. (Chariri, 2009) menjelaskan penelitian kualitatif merupakan yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan tujuan memahami dan menginvestigasi lebih jauh suatu fenomena; apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana hal itu bisa terjadi? Adapun pendekatannya menggunakan literatur review, dimana penulis mencoba untuk mengkaji lebih jauh suatu fenomena dengan berbagai sumber kajian, baik itu buku ataupun jurnal-jurnal ilmiah yang terkait.

II PEMBAHASAN

Pembangunan ekonomi adalah suatu studi yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di negara-negara yang sedang berkembang, dengan memecahkan masalah-masalah utamanya yakni kemiskinan, pengangguran dan pemerataan. Pembangunan di negara-negara berkembang

pada pelaksanaannya telah memunculkan pola, metode, atau model yang berbeda-beda diantara mereka. Perbedaan ini telah menjadi paradigma atau pandangan yang mendunia dalam melaksanakan pembangunan (Sukirno, 2009).

Dalam ekonomi pembangunan konvensional, isu utama dalam perekonomian adalah pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi indikator kesejahteraan dan menjadi solusi bagi setiap krisis ekonomi. Pertumbuhan ini dipacu dengan peningkatan sumber daya terutama sumber daya manusia dan teknologi (Ulum, 2015).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara terjadi jika terjadi peningkatan nilai total barang dan jasa yang diproduksi. Pertumbuhan ini biasanya dilihat pada dua dimensi besar, yaitu titik tekan pertumbuhan dan pengukuran pertumbuhan. Logika yang dibangun dari penekanan pertumbuhan ini adalah karena persaingan ideologi yang ingin menunjukkan ideologi mana antara Komunis dengan Kapitalis yang lebih mampu menciptakan ekonomi yang baik. Selanjutnya mereka berasumsi bahwa *more is better*. Sedangkan pengukuran pertumbuhan yang mereka gunakan adalah per kapita GNP. Jika per *capita income* yang didapatkan dari total real GNP yang dibagi dengan jumlah penduduk itu tinggi, maka pertumbuhan ekonomi tinggi dan disinyalir kesejahteraan juga tinggi.

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi selalu menjadi masalah utama, padahal Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki

potensi sumber daya alam, antara lain: sumber daya hutan, laut, udara, tanah, dan hasil tambang (Geografi, 2017). Salah satu hasil sumber daya laut yaitu berupa perikanan, diperkirakan oleh Komite Kajian Stok Ikan Nasional (Kasjikan, 2017) bahwa potensi perikanan nasional pada tahun 2017 akan mencapai 9,9 juta ton. Dari potensi-potensi yang dimiliki oleh negara ini membuktikan bahwa sesungguhnya negara Indonesia mampu untuk membangun negara yang akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Istilah pembangunan ekonomi (*economic development*) biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai "*economic development is growth plus change*" atau pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi (Almizan, 2016).

Menurut (Nawawi, 2009) pembangunan dalam perspektif adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilakukan oleh bangsa, negara dan pemerintah. Pembangunan ekonomi lebih luas dari konsep pembangunan ekonomi konvensional walaupun dasar pembangunan ekonomi Islam adalah multidimensional. Islam mempunyai beberapa dimensi diantaranya dimensi moral, sosial, politik dan ekonomi (Mannan, 1993).

Ada tiga dimensi ketimpangan menurut (INFID, 2015) yaitu ketimpangan antar wilayah, antar sektor dan antar kelompok pendapatan. Serta ada dua ketimpangan yaitu ketimpangan *income*

dan *opportunity*. Ketimpangan tidak hanya memperlambat pengentasan kemiskinan, tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengancam kohesi sosial.

A. Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Alat Ukur Maju Mundurnya Suatu Negara

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Output per kapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Jadi proses kenaikan output per kapita harus dilihat dan dianalisis dari output total disatu pihak dan jumlah penduduk dilain pihak (Boediono, 1992).

Menurut (Almizan, 2016) menjelaskan pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat, yang selanjutnya diiringi dengan peningkatan kemakmuran masyarakat. Adapun (Susanti, 2000) dalam (Yulianita, 2005) menjelaskan bahwa indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan produk nasional seperti Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara terjadi jika terjadi peningkatan nilai total barang dan jasa yang diproduksi. Pertumbuhan ini biasanya dilihat pada dua dimensi besar, yaitu titik tekan pertumbuhan dan pengukuran pertumbuhan. Logika yang

dibangun dari penekanan pertumbuhan ini adalah karena persaingan ideologi yang ingin menunjukkan ideologi mana antara Komunis dengan Kapitalis yang lebih mampu menciptakan ekonomi yang baik. Selanjutnya mereka berasumsi bahwa *more is better*. Sedangkan pengukuran pertumbuhan yang mereka gunakan adalah perkapita GNP. Jika *per capita income* yang didapatkan dari total real GNP yang dibagi dengan jumlah penduduk itu tinggi, maka pertumbuhan ekonomi tinggi dan disinyalir kesejahteraan juga tinggi (Louis & Dow, 1991).

B. Pertumbuhan Ekonomi dalam Paradigma Islam

Paradigma sebagai ruang lingkup berpikir dan aktivitas menjadi variabel yang cukup signifikan dalam membedakan paradigma pembangunan ekonomi Islam. Perbedaan cara pandanglah yang memunculkan kesimpulan yang berbeda tentang paradigma pembangunan ekonomi (Huda, 2015). Dalam konteks pemikiran landasan pembangunan konvensional hanya mendasarkan materialistis, sistem nilai dan etika yang ditawarkan oleh Islam berbeda dengan yang di usung oleh kapitalisme dan sosialisme. Aspek spiritual menjadi dasar utama yang membedakannya (Nawawi, 2009). Adapun sistem ekonomi Islam berangkat dari *way of life* (An nabhani, 2010) kesadaran tentang etika sebuah, *ethical economy* seorang muslim dalam berekonomi. Sedangkan sistem ekonomi lain, baik kapitalisme maupun sosialisme, berangkat dari kepentingan (*interest*) (Fadlan, 2010).

Pertumbuhan ekonomi dalam Islam, bukan hanya dalam persoalan ekonomi

semata melainkan aktivitas manusia yang ditunjukkan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi materi dan spiritual manusia (Tariqi, 2004). Dilihat dari tujuan pokoknya, Islam tidak melihat pertumbuhan kekayaan sebagai sesuatu yang terpisah dengan cara distribusinya (pemerataan) dan tuntutan realisasi keadilan sosial. Menurut (Chapra, 2000) pemerataan yang optimal apabila distribusi kebutuhan-kebutuhan individu telah berhasil dipenuhi secara memadai dan telah terwujud pembagian pendapatan dan kekayaan yang merata tanpa mengakibatkan efek samping yang buruk. Efisiensi pemerataan dalam distribusi tidak akan terwujud apabila moral tidak dibentuk.

Selain itu pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata atau hasil dari kuantitas, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, sosial dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu terjadinya keterbelakangan, kekacauan dan jauh dari nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan ekonomi (Beik, 2016).

C. Politik Ekonomi Islam Sebuah Solusi Meningkatkan Pemerataan

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ideal dan komprehensif, maka harus diperhatikan distribusi kekayaan. Dalam pandangan sistem ekonomi Islam, buruknya distribusi kekayaan di tengah

masyarakat itulah berdampak timbulnya kemiskinan dan ketimpangan ekonomi (HTI, 2017). Kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi rakyat akan terwujud, karena politik ekonomi Islam adalah menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat bisa terpenuhi. Islam telah menjadikan negara sebagai penjamin pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan keamanan) rakyat (Maliki, 2001). Islam juga membolehkan negara memiliki suatu kepemilikan khusus terhadap kekayaan tersebut (an-Nabhani, 2010).

Selain itu politik ekonomi Islam membedakan kebutuhan pokok individu dengan kebutuhan pokok masyarakat termasuk mekanisme pemenuhannya. Secara umum hal itu di wujudkan dengan dua mekanisme yaitu mekanisme langsung dan mekanisme tidak langsung. Mekanisme langsung diwujudkan dalam bentuk negara secara langsung memenuhi kebutuhan jasa pokok berupa keamanan, pendidikan dan kesehatan. Adapun berkaitan dengan mekanisme tidak langsung dilakukan dengan menciptakan kondisi dan sarana pemenuhan kebutuhan pokok barang (sandang, pangan, papan) (al Maliki, 2009).

Berkaitan dengan kebijakan ekonomi tidak langsung ini dilakukan dengan beberapa poin penting diantaranya;(1) Kewajiban bekerja, (2) Penyediaan lapangan kerja, (3) Kewajiban ahli waris, (4) Tanggungjawab Tetangga dan (5) Subsidi baitul mal. Dalam Islam terdapat beberapa ayat menjelaskan tentang keutamaan dan kewajiban bekerja, diantara: “...Maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu

beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah:10). Selanjutnya firman Allah “*Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan izin-Nya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur” (QS. Al-Jatsyah :12.*

Selain dari dalil ayat alquran masih terdapat pula dalam hadist yang menjelaskan tentang keutamaan bekerja, diantaranya; “*Tidaklah seorang di antara kamu, makan suatu makanan lebih baik daripada memakan dari hasil keringatnya sendiri” (HR. Baihaqi).* Selanjutnya hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad “*Barangsiapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang hari maka pada malam itu ia diampuni.”(HR. Ahmad).*

Begitupun dengan hadist lain yang diriwayatkan oleh Abu Nu’aim “*Sesungguhnya di antara perbuatan dosa ada dosa yang tidak bisa terhapus (ditebus) oleh (pahala) shaum dan Shalat. Ditanyakan pada beliau: ‘Apakah yang dapat menghapuskannya, Ya Rasulullah?’ Jawab Rasul saw: “Bekerja (kesusahan) dalam mencari nafkah penghidupan”(HR. Abu Nu’aim).*

Adapun berkaitan dengan peran negara, maka untuk menjaga pemerataan ekonomi dan distribusi kekayaan, dapat dilakukan dengan tata kelola kepemilikan umum dan negara. Dalam politik ekonomi Islam, peran dan kontribusi negara sangat vital, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim “*Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan*

(rakyat), dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim) berkenaan dengan hal itu maka wujud tanggung jawab negara adala mampu mengelola kepemilikan dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan penjelasan diatas, Amhar (2009) menyebutkan jika kekayaan

milik umum dan negara ini di kelola dengan baik, bisa menghasilkan pendapatan bagi negara yang sangat besar. Bahkan tidak perlu negara menggantungkan hidupnya dari sumber pajak sebagai. Lebih jauh berdasarkan hasil penelitiannya setidaknya Indonesia bisa memperoleh pendapatan tiap tahunnya sebesar Rp. 1.764 T. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Penerimaan Sektor Kepemilikan Umum

No	Kepemilikan Umum	Penerimaan (Juta Dinar)	Penerimaan (Triliun Rupiah)
1	Minyak	121,5	182,25
2	Gas	179,9	268,35
3	Batubara	127,5	191,25
4	Emas dan Mineral	33,5	50,25
5	BUMN Kelautan	48,9	73,35
6	Hasil Hutan	666	999
Jumlah		1.176,3	1.764,45

Sumber: Amhar (2009)

Berdasarkan tabel diatas terlihat, hanya dari tatakelola sektor kepemilikan umum saja bisa didapatkan pendapatan yang sangat besar. Hal ini belum ditambah dari pengelolaan sumber- sumber pendapatan lainnya. Namun demikian semua ini hanya bisa diwujudkan jika tata kelola ekonomi negeri ini menggunakan sistem ekonomi Islam, lebih khusus melalui politik ekonominya.

III SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek

moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi.

Kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi yang ideal akan mampu terwujud dengan optimal dan memiliki dampak terhadap pemerataan ekonomi jika menggunakan politik ekonomi Islam yang menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat bisa terpenuhi.

Strategi langsung dan tidak langsung mampu mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Strategi langsung diwujudkan dalam bentuk negara secara langsung memenuhi kebutuhan jasa pokok berupa keamanan, pendidikan dan kesehatan. Adapun berkaitan dengan Strategi tidak langsung dilakukan dengan

menciptakan kondisi dan sarana pemenuhan kebutuhan pokok barang (sandang, pangan, papan).

Peran dan kontribusi negara sangat vital, untuk menjaga pemerataan ekonomi dan distribusi kekayaan, dapat dilakukan dengan tata kelola kepemilikan umum dan negara

DAFTAR PUSTAKA

- Al-maliki, A. (2009). *Politik Ekonomi Islam*. Bogor: Al Azhar Perss.
- Almizan. (2016). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *MAQDIS: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 204-222.
- Amhar, & Fahmi, (2009). Mencoba Meramu APBN Syariah. <http://famhar.multiply.com/journal/item/179>
- an-Nabhani, T. (2010). *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam (Sistem Ekonomi Islam)*. Bogor: Al Azhar Press.
- Beik, I. S. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Boediono. (1992). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- BPS. (2017, Mei 5). [Seri 2010] *PDB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2014-2017*. Retrieved from Badan Pusat Statistika: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/827>
- _____. (2017, Mei 5). *Laju Pertumbuhan PDB Indonesia dengan Tahun Dasar 2010*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/>
- Chapra, U. (2000). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani.
- Chariri, Anis. 2009. "Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif", Paper disajikan pada Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 31 Juli – 1 Agustus 2009
- Fadlan. (2010). *Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam* (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sejahtera). *al-Ihkam*, Vo 1.V N o .2, 259.
- Geografi, P. S. (2017, Januari 10). *5 Potensi Sumber Daya Alam Indonesia*. Retrieved from IlmuGeografi.com: <http://ilmugeografi.com/biogeografi/potensi-sumber-daya-alam>
- HTI. (2017, Maret 29). *Cara Islam Mengatasi Ketimpangan Ekonomi Global*. Retrieved from Al-Wa'ie: <https://hizbut-tahrir.or.id/2017/03/29/cara-islam-mengatasi-ketimpangan-ekonomi-global/>
- Huda, N. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- INFID. (2015). *Ketimpangan*. Jakarta: INFID (International NGO Forum On Indonesian Development), <http://infid.org/ketimpangan/>.
- KASJIKAN. (2017). *2017, Potensi Perikanan Tangkap Lestari Capai 9,9 Juta Ton*. Yogyakarta:

- KKPNews,
<http://news.kkp.go.id/index.php/2017-potensi-perikanan-tangkap-lestari-capai-99-juta-ton/>.
- Louis A. Dow, F. N. (1991). *Economics and Society*. Prentice Hall: New Jersey.
- Mannan, M. (1993). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Nawawi, I. (2009). *Pembangunan Dalam Perspektif Islam*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- OXFAM. (2017, Februari). *Menuju Indonesia Yang Lebih Setara: Laporan Ketimpangan Indonesia*. Retrieved from ISSUU: https://issuu.com/oxfaminindonesia/docs/report_indonesia
- Rahardja, P. (2008). *Pengantar Ilmu ekonomi: mikroekonomi dan makroekonomi*. Jakarta: fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sukirno, S. (2009). *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan*. Jakarta: Bima Grafika.
- Tariqi, A. A. (2004). *Ekonomi Islam- Prinsip, Dasar dan Tujuan*. alih Bahasa: M. Irfan Syofwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Ulum, F. (2015). *Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Yang Merata*. TSAQAFAH, 3.
- WorldBank. (2015, Desember 8). *Meluasnya Ketimpangan di Indonesia*. Retrieved from The World Bank: <http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide>
- Yulianita, A. (2005). Analisis Konvergensi Ekonomi Antar Daerah di Sumatera Selatan. *EPrints UNSRI*.